

PERPUSTAKAAN
IAIN SU
MEDAN

**SISTEM POLITIK SARAKOPAT:
ANALISA TERHADAP PEMERINTAHAN TANAH
GAYO DAN RELEVANSINYA DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

T E S I S

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Dalam Ilmu
Agama Islam

Oleh:

SYUKRI
NIM.01 PEMI 338

PROGRAM STUDI : PEMIKIRAN ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 0 3**



SISTEM POLITIK SARAKOPAT:

ANALISA TERHADAP PEMERINTAHAN TANAH GAYO DAN RELEVANSINYA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH

T E S I S

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Dalam Ilmu
Agama Islam

Oleh:

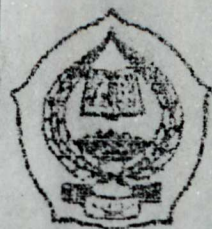
SYUKRI
NIM.01 PEMI 338

PROGRAM STUDI : PEMIKIRAN ISLAM



320
SYU
s.
c.i

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 0 3



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Pembangunan Komplek Pondok Surya, Helvetia Timur, Medan 20124 Tel. 8465290 Fax. 8465290
E.mail: ppsiaain @ indosat.net.id

PERSETUJUAN JUDUL TESIS

Nomor : IN.14/PS/PP.9/036/2003

Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, dengan ini memberikan persetujuan judul tesis atas nama Syukri, Nim: 01 PEMI 338 yang berjudul "**SISTEM POLITIK SARAKOPAT: Analisa Terhadap Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah**" dengan pembimbing:


- I. Prof. Dr. H. Usman Pelly, MA (isi)
- II. Dr. H. Hasyimasyah Nasution, MA (Metodologi)

Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu.

Medan, 11 Januari 2003

Direktur,



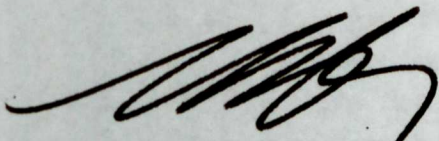

Hasyimasyah Nasution, MA
NIP. 150 216 584

PENGESAHAN

Setelah membaca, mengoreksi dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Tesis Saudara An. **Syukri**, NIM 01 PEMI 338 yang berjudul: "**SISTEM POLITIK SARA KOPAT: Analisa Terhadap Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah**", maka kami berpendapat bahwa Tesis ini dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister (M.Ag.) dalam Ilmu Agama Islam pada konsentrasi Pemikiran Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.

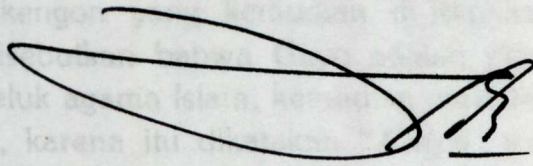
Medan, 08 Agustus 2003

PEMBIMBING I



PROF. DR. H. USMAN PELLY, MA

PEMBIMBING II



DR. H. HASYIMSYAH NASUTION, MA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA



DR. H. HASYIMSYAH NASUTION, MA

ABSTRAKSI

S*arakopat* adalah wadah aparatur pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum adat yang selaras dengan syariat Islam. Pemberdayaan hukum adat di Kabupaten Aceh Tengah diproyeksikan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi kelangsungan pembangunan, dan turut serta mendorong ketertiban, keamanan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis.

Sistem politik *Sarakopat* ini timbul dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. **Faktor internal** disamping menjaga dan memelihara harkat dan martabat serta kehormatan "**Sarak**" (wilayah, kampung), juga memelihara tegaknya hukum adat dan budaya Gayo dalam kehidupan masyarakat Gayo yang selaras dengan syariat Islam. Sedangkan **faktor eksternal** adalah disamping mengembangkan "**Sarak**", adat dan budaya Gayo, juga menjalin hubungan dengan dunia luar, baik hubungan persahabatan, perkawinan, perdagangan maupun komunikasi dan politik.

Pada masa Pra-Islam, orang Gayo ketika itu, masih animistis dan nama kelompok etnis ini adalah Gayo, jadi bukanlah timbul sesudah orang Batak 27 datang ke Takengon yang kemudian di-Islamkan. Menurut versi raja-raja Pasai disebutkan bahwa Gayo adalah orang Samudera yang tidak mau memeluk agama Islam, kemudian melarikan diri ke Hulu Sungai Peusangan, karena itu dikatakan "**Kaiyo**" yang berarti "**Takuf**". Sebenamnyalah orang Gayo bukan takut dan melarikan diri, melainkan hijrah untuk mencari penghidupan yang lebih layak dan luas ke Samudera Pasai.

Sistem politik *Sarakopat* ketika zaman Pra-Islam masih belum dikenal, sebab sistem politik ketika itu adalah "**Sarak Tulu**" (tiga *Sarak* dalam satu kesatuan terpadu, yaitu *reje* (raja), *petue* (petua), dan *rayat* (rakyat). Barulah setelah agama Islam datang ke Tanah Gayo sekitar tahun 173 H/800 M, maka terbentuklah "sistem politik *Sarakopat*" karena ditambah "*imem* (imam) sebagai pelaksana syariat Islam. Pada zaman Islam pemerintahan *Sarakopat* sangat maju dan berkembang, karena *Sarakopat* merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan, tidak ada pemerintahan lain, terutama pada masa Kerajaan Linge (\pm 181 H/808 M), Kerajaan Bukit (\pm 1580 M, atau abad ke-XV), Kerajaan Cik Bebesen (\pm 1607 atau abad ke XVI), dan Kerajaan Syiah Utama (\pm 1580 atau abad ke-XV). Pada zaman Kerajaan tersebut hukum adat Gayo dan budaya Gayo telah berkembang dengan baik, sangat orisinal dan adiluhung.

Ketika penjajahan Belanda datang ke Tanah Gayo pada tahun 1901-1942, dan menyusul penjajahan Jepang pada tahun 1942-1945, sistem pemerintahan *Sarakopat* mulai menurun, bahkan kurang berfungsi, karena struktur pemerintahan lebih dikuasai oleh pemerintahan kolonial. Adat/Budaya Gayo dan sistem politik *Sarakopat* yang bertentangan dengan kepentingan penjajahan Belanda dan Jepang dihilangkan, sedangkan Adat/Budaya Gayo dan sistem pemerintahan *Sarakopat* yang mendukung kepentingan penjajahan Belanda dan Jepang tetap dipelihara dan dilestarikan.

Demikian juga pada zaman Kemerdekaan RI tahun 1945 pemerintahan *Sarakopat* belum berfungsi sampai akhir tahun 1969. Oleh karena, disamping faktor penjajahan tersebut, juga faktor ekonomi yang masih lemah, ditambah faktor pendidikan dan politik negara yang belum kondusif. Pada zaman kemerdekaan, sistem politik *Sarakopat* dapat dikatakan "**hidup segan mati tak mau**", artinya dikatakan hidup namun tidak berfungsi, dan dikatakan mati, namun kedengaran *Sarakopat* masih tetap ada. Barulah pada zaman Orde Baru, pemerintahan *Sarakopat* muncul kembali, yakni sejak **tanggal 1 April 1969**, adat/budaya Gayo mulai digali dan dikembangkan, serta sistem politik *Sarakopat* mulai dilaksanakan, melalui program sub sektor bidang pembangunan agama dan sosial budaya.

Pada zaman Reformasi (1998 hingga sekarang) yang menuntut adanya perbaikan disegala bidang, salah satu yang sangat penting ialah lahirnya hak-hak otonomi yang lebih besar bagi rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Aceh Tengah. Dengan otonomi yang lebih luas, masyarakat Gayo lebih leluasa dalam menjalankan adat/budaya, agama, pendidikan dan sistem pemerintahan *Sarakopat* di Tanah Gayo. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang Otonomi Daerah, sistem politik *Sarakopat* lebih berperan dan difungsikan lagi.

Sistem politik pemerintahan *Sarakopat* adalah suatu sistem berdasarkan hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam, kedudukan *reje* (raja) di Tanah Gayo adalah sebagai "pemangku adat". Semua kekuasaan berada di tangan raja. Raja sebagai kepala pemerintahan, sebagai jaksa, sebagai hakim, dan sebagai kepala agama, suatu pemerintahan yang berdasarkan "*sistem feodal*". Yang dilaksanakan secara "*monarchiheridetis*" (kerajaan turun temurun), dan susunan pemerintahan berdasarkan republik-republik yang *patrilineaal* (melalui garis keturunan lurus bapak) atau *patriachaal* (dari nenek moyang). Meskipun demikian *reje* (raja) tidak boleh bertindak diktator atau sewenang-wenang, karena dia harus mentaati hukum adat dan prinsip musyawarah "**keramat mufakat behu berdedele**" (mufakat adalah sumber kekuatan dan demokrasi adalah satu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Gayo).

Secara teknis *reje* (raja) disamping dibantu oleh aparat pemerintahan *Sarakopat*, juga dibantu oleh aparat pelaksanaan tugas harian, yaitu "*Kejurun Belang*" (memimpin pertanian tanaman pangan), "*Penghulu Rerak*" (memimpin sumber mata air), "*Penghulu Uten*" (memimpin dan mengawasi hutan), "*Penghulu Uwer*" (memimpin pengembangan ternak), "*Penghulu Lut*" (memimpin usaha perikanan), "*Pawang Deret*" (memimpin dan mengurus margasatwa), disamping itu, *reje* (raja) dibantu oleh "*Biden*" (memimpin urusan kesehatan), "*Hariye*" (bidang humas dan penerangan), dan "*Banta*" (sekretaris atau ajudan *reje*). Jika *reje* atau raja berhalangan digantikan sementara oleh "*Bedel*" (wakil atau pembantu *reje*), demikian juga *imem* (imam), jika berhalangan digantikan oleh "*Lebe*" (wakil atau pembantu *imem*). Dan *petue* (petua) jika berhalangan digantikan oleh "*Sekolat*" (wakil atau pembantu *petue*).

Sistem politik *Sarakopat* di atas, masih relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebab Otonomi Daerah tidak akan dapat berjalan tanpa didukung oleh masyarakat, dan tanpa kebijakan yang didasari oleh nilai-nilai adat/budaya Gayo yang selaras dengan syariat Islam, serta mekanisme politik pemerintahan *Sarakopat*. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 sangat relevan dengan sistem politik *Sarakopat*, karena undang-undang tersebut telah membuka saluran baru yang cukup luas bagi Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Gayo Aceh Tengah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lembaga *Sarakopat* sebagai wadah pemerintahan, merupakan wahana untuk merealisasikan penyelenggaraan undang-undang tersebut. Jadi keduanya saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Kewenangan "*Kejurun Belang*" sangat relevan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, "*Penghulu Rerak*" sangat relevan dengan Dinas Perkebunan dan Pekerjaan Umum bagian pengairan, "*Penghulu Uten*" sangat relevan dengan Dinas Kehutanan, "*Penghulu Uwer*" sangat relevan dengan Dinas Peternakan, "*Penghulu Lut*" sangat relevan dengan Dinas Perikanan. Kewenangan aparat pemerintahan *Sarakopat* apabila diterapkan sangat relevan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, terutama dalam mengatur dan mengurus Pemerintahan Daerah, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden rata-rata 26,08% jawaban menyatakan masih sangat relevan, 67,83% masih relevan. Namun terdapat pula 3,48% menyatakan kurang relevan, dan 2,61% tidak relevan, jawaban itu wajar karena mungkin saja responden melihat saat ini fungsi aparat pemerintahan *Sarakopat* yang kadang-kadang kurang sinergetik dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo yang sudah berkembang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1987 Nomor : 158/987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

1	2	3	4
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

معددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

i. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- ii. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- iii. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- /	fathah	ditulis	a
----- /	kasrah	ditulis	i
----- َ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

i. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>alqurān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR TABEL

NO	NOMOR TABEL	J U D U L	HLM
1	2	3	4
01	TABEL 1.1.	WILAYAH ADMINISTRASI, NAMA KECAMATAN, LUAS, JUMLAH DESA DAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.	37
02	TABEL 1.2	PENGGUNAAN TANAH MENURUT KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH	47
03	TABEL 1.3	PENYELESAIAN PENGURUSAN HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT JENISNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2002	49
04	TABEL 1.4	JUMLAH DAN LETAK OBJEK WISATA DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH	52
05	TABEL 1.5	INVENTARIS FAUNA MENURUT JENISNYA PADA SUAKA ALAM/HUTAN WISATA DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.	55
06	TABEL 1.6	BANYAKNYA PENDUDUK DIPERINCI MENURUT JENIS KELAMIN SEK RATIO PER-KECAMATAN DALAM DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.	56
07	TABEL 1.7	PENDUDUK DIPERINCI MENURUT KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH KEADAAN AKHIR TAHUN 1998 SAMPAI 2002	57
08	TABEL 1.8	DISTRIBUSI PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN	58
09	TABEL 1.9	DISTRIBUSI PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN DI LUAR SEKTOR PERTANIAN.	59
10	TABEL 1.10	DISTRIBUSI PENDUDUK BERDASARKAN PENGANUT AGAMA	61
11	TABEL 1.11	SARANA PENDIDIKAN NEGERI/SWASTA DALAM LINGKUNGAN DEPDIKNAS DIPERINCI MENURUT KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2001/2002.	62

1	2	3	4
12	TABEL 1.12	SARANA PENDIDIKAN NEGERI/SWASTA DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA DIPERINCI MENURUT KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2001/2002.	63
13	TABEL 1.13	KEADAAN SARANA IBADAH DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2002.	64
14	TABEL 1.14	KEADAAN SARANA KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2002.	64
15	TABEL 1.15	KEADAAN SARANA UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH.	65
16	TABEL 1.16	KEADAAN SARANA EKONOMI DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2002	66
17	TABEL 1.17	KEADAAN SARANA INFORMASI DAN PERHUBUNGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2002	68
18	TABEL 2.1	SILSILAH-SILSILAH KERAJAAN LINGE.	99
19	TABEL 2.2	SILSILAH-SILSILAH KERAJAAN BUKIT.	103
20	TABEL 2.3	SILSILAH-SILSILAH KERAJAAN RAJA-RAJA KECIL YANG TUNDUK DI BAWAH KERAJAAN BUKIT.	103
21	TABEL 2.4	SILSILAH-SILSILAH KERAJAAN CIK BEBESAN	108
22	TABEL 2.5	SILSILAH-SILSILAH KERAJAAN SYIAH UTAMA	112
23	TABEL 3.1	RELEVANSI SISTEM SARAKOPAT DALAM MENGATUR DAN MENGURUS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH	258
24	TABEL 3.2	LETAK RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, TERUTAMA DALAM MENGATUR DAN MENGURUS PEMERINTAHAN DAERAH.	260
25	TABEL 3.3	PERANAN SARAKOPAT DALAM MENGATUR DAN MENGURUS PEMERINTAHAN DAERAH.	262

1	2	3	4
26	TABEL 3.4	RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI SUMBER-SUMBER EKONOMI ATAU KEUANGAN DAERAH	265
27	TABEL 3.5	LETAK RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI SUMBER-SUMBER EKONOMI ATAU KEUANGAN DAERAH	266
28	TABEL 3.6	RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI DAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)	270
29	TABEL 3.7	LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI DAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA ALAM (SDA).	271
30	TABEL 3.8	RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).	276
31	TABEL 3.9	LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).	277
32	TABEL 3.10	RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN PRINSIP MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI	279
33	TABEL 3.11	LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT TERHADAP MENUMBUHKEMBANGKAN PRINSIP MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI	282
34	TABEL 3.12	RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT	286
35	TABEL 3.13	PERANAN SARAKOPAT DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT	287
36	TABEL 3.14	LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT	289
37	TABEL 3.15	RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN SOSIAL BUDAYA/ADAT ISTIADAT DAN KEMASYARAKATAN.	293
38	TABEL 3.16	LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN SOSIAL BUDAYA/ ADAT ISITIADAT	294

1	2	3	4
39	TABEL 3.17	LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	295
40	TABEL 3.18	RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MEMFUNGSIONALKAN DPRD KABUPATEN ACEH TENGAH	301
41	TABEL 3.19	LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MEMFUNGSIONALKAN SECARA OPTIMAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) ACEH TENGAH	303
42	TABEL 3.20	RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DALAM UPAYA MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	306
43	TABEL 3.21	SIKAP MASYARAKAT GAYO TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI NAD YANG SALAH SATU DIDALAMNYA DIAPLIKASIKAN SYARAT ISLAM	308
44	TABEL 3.22	LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM	310
45	TABEL 3.23	UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	312
46	TABEL 3.24	NILAI-NILAI YANG PERLU DIKEMBANGKAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH	316

DAFTAR GAMBAR DAN SKEMA

NO	J U D U L	HALAMAN
01	SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN	22
02	PANORAMA DANAU LAUT TAWAR	53
03	KENDI (<i>KENI</i>) GAYO	87
04	BAWAR RAJA BUKIT DAN RAJA SYIAH UTAMA	104
05	SKEMA STRUKTUR ORGANISASI <i>SARAKOPAT</i>	161
06	SKEMA <i>UMAH PITU RUANG</i> (RUMAH TUJUH RUANG)	179
07	SKEMA TUTUR BAHASA GAYO DALAM SISTEM KEKERABATAN	197
08	SKEMA SISTEM NILAI BUDAYA GAYO	318

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji hanya milik Allah swt., Tuhan semesta alam, dan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Kemudian shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah, Muhammad saw., beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman.

Tesis ini berjudul, **“SISTEM POLITIK SARAKOPAT: Analisa Terhadap Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah”**. Tesis ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister (M.Ag) dalam Ilmu Agama Islam. Tesis ini telah mencoba memberikan gambaran yang sebenarnya tentang sistem politik *Sarakopat* di Tanah Gayo. Bagaimana *Sarakopat* sebagai empat tiang yang kokoh dari wadah pemerintahan telah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum dan nilai-nilai adat yang selaras dengan syariat Islam. Hukum adat dilandasi oleh nilai-nilai, norma sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah, perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Lebih dari itu, penelitian tesis ini, mengungkapkan bagaimana lembaga *Sarakopat* menampung dan menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara harmonis dan demokratis serta obyektif dalam menyelesaikan permasalahan. Disamping itu, penelitian ini dikaitkan dengan

pelaksanaan Otonomi Daerah. Persoalan Otonomi Daerah adalah persoalan penting untuk dikaji lebih sistematis dan radikal, sebab di Indonesia tuntutan kearah itu melahirkan berbagai implikasi yang rumit dan tafsiran yang tidak sama. Justru itu diperlukan penelitian ilmiah yang objektif dan hasilnya dapat dijadikan bahan bacaan bagi para pemerhati dan masyarakat luas.

Namun di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, peneliti banyak menemukan kesulitan dan hambatan-hambatan, terutama dalam memperoleh data dan informasi yang obyektif di lapangan, termasuk mendapatkan literatur primer dan keterbatasan peneliti untuk menulis dan menganalisanya. Akan tetapi, berkat atas rahmat Allah swt., serta bimbingan, arahan, dan saran-saran dari semua pihak, Alhamdulillah segala problema tersebut dapat di atasi dengan cara yang lebih baik. Untuk itulah peneliti tidak luput mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution sebagai Rektor IAIN Sumatera Utara Medan, dan Bapak Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, serta semua dosen yang telah memberikan motivasi dan bimbingan akademik selama peneliti mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Usman Pelly, MA, sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA, sebagai pembimbing II, serta Bapak Dr. Hasan Asari, MA, sebagai pembimbing seminar proposal tesis, yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, saran-saran dan masukan yang diberikan kepada peneliti, demi kesempurnaan isi dan metodologi penulisan tesis ini.

3. Bapak Drs. Tengku H. Mustafa M. Tamy, MM., sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan Bapak Camat Kecamatan Kota Takengon, Bintang, Silih Nara, Bebesen, Pegasing dan Bukit, serta Bapak Letnan Kolonel Inf. Amrin sebagai Komandan Distrik Militer 0106 Kabupaten Aceh Tengah, dan Bapak IPTU NRP. S. Nanang Widodo, sebagai Kapolsek Kota Takengon, yang telah banyak memberikan bimbingan, informasi dan data penelitian ini.
4. *Awan* (kakek) Tengku H. Mohd. Ali Djadun, sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim, sebagai Ketua BAZIS dan Pimpinan Yayasan Sekolah Tinggi Gajah Putih Takengon, Bapak A.R. Hakim Aman Pinan, sebagai Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Drs. H.M Din A. Wahab, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tengah, dan Bapak Drs. Nasrilisma, sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, serta semua informan yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan bimbingan, informasi dan data penelitian ini, serta telah meluangkan waktu untuk mengisi angket, demi kelancaran penulisan penelitian tesis ini.
5. Seluruh sahabat seperkuliahan di Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, dan Keluarga Gayo Aceh Tengah (KGAT) baik wilayah, daerah maupun cabang, telah turut serta memberikan dorongan, dan kontribusi pemikiran bagi peneliti dalam upaya menyelesaikan penulisan tesis ini. Termasuk Suparjo Sayuti, S.H.I. dengan Fermana Computernya yang telah membantu proses pengetikan penelitian ini.

6. Abangda Drs. Azharia, U.R dan abangda Aman Hayati yang selalu mendampingi peneliti untuk mencari data penelitian dan informasi yang dibutuhkan. Teristimewa kepada *Ama* dan *Ine* (ayahanda Usman Raliby, dan ibunda Halimah) yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membesarkan dan mendo'akan peneliti dalam mengarungi perjuangan hidup, termasuk seluruh anggota keluarga yang turut memberikan dorongan dan do'a restunya.
7. Secara khusus peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada isteriku Sabariyah, MS tercinta yang menjadi pendorong dan memberi semangat dalam mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Pengorbanan, keikhlasan, dorongan moril dan cinta kasih yang telah diberikan dapat menjadi semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan program studi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu saran-saran dan masukan yang dapat memperkaya tulisan ini, peneliti harapkan dari semua pihak. Atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan tidak dapat peneliti membalasnya, melainkan menyerahkannya kepada Allah swt., semoga memperoleh imbalan yang berlipat ganda, dan penelitian tesis ini diharapkan menjadi salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah swt., bagi kita semua. Amin.

Medan, 8 Agustus 2003

PENELITI



SYUKRI

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR DAN SKEMA.....	xii
PETA KABUPATEN ACEH TENGAH.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	8
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Kajian Kepustakaan	15
G. Kerangka Pemikiran.....	20
H. Pendekatan dan Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Yang Digunakan	23
2. Metode Penelitian	24
a. Jenis Penelitian	24
b. Lokasi Penelitian	24
c. Populasi Penelitian	25
d. Metode Penarikan Sampel.....	27
e. Hipotesis Penelitian	27
f. Sumber Data Penelitian	28

g. Jenis-Jenis Data Penelitian	29
h. Metode Pengumpulan Data	29
i. Metode Analisa Data	30
I. Karakteristik Informan	30
J. Sistematika Pembahasan	32
BAB II	GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN
	ACEH TENGAH
A. Geografi Kabupaten Aceh Tengah	36
BAB III	B. Sejarah Singkat Pembentukan Pemerintahan
	Kabupaten Aceh Tengah
	37
1. Masa Pra Kolonial	37
2. Era Kolonial	39
3. Era Kemerdekaan	40
4. Era Reformasi	42
C. Kondisi Alam Kabupaten Aceh Tengah	44
1. Kondisi Lingkungan Fisik Alam	44
2. Kondisi Lingkungan Fisik Buatan	47
3. Pemberian Hak Tanah Menurut Jenisnya	49
4. Objek Wisata	50
D. Kondisi Penduduk Kabupaten Aceh Tengah	55
1. Kepadatan Penduduk	55
2. Perkembangan Berdasarkan Jumlah Penduduk	
1998-2002	56
3. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	58
4. Penduduk Yang Menganut Agama	60

E. Keadaan Sarana dan Prasarana	61
1. Sarana Pendidikan	62
2. Sarana Ibadah	63
3. Sarana Kesehatan	64
4. Sarana Umum.....	65
5. Sarana Ekonomi	66
6. Sarana Informasi dan Perhubungan	67
BAB III LATAR SEJARAH MUNCULNYA SISTEM POLITIK	152
SARAKOPAT DI TANAH GAYO	
A. Latar Belakang Internal dan Eksternal.....	69
1. Latar Belakang Internal	69
2. Latar Belakang Eksternal	76
B. Gayo Dan <i>Sarakopat</i> Dalam Lintasan Sejarah ...	79
1. Zaman Pra-Islam (sekitar \pm 617 SM).....	79
2. Zaman Islam (\pm 173 H/ 800 M)	91
a. Kerajaan Linge (\pm 181 H/808 M)	93
b. Kerajaan Bukit (\pm 1580 M)	99
c. Kerajaan Cik Bebesen (\pm 1607 M).....	104
d. Kerajaan Syiah Utama (\pm 1580 M)	109
3. Zaman Penjajahan Belanda (1901-1942).....	113
4. Zaman Penjajahan Jepang (1942-1945)	119
5. Zaman Kemerdekaan RI (1945-1998).....	123
6. Zaman Reformasi (1998-sekarang)	132

BAB IV SARAKOPAT SEBAGAI LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAHAN

A. <i>Sarakopat</i> Sebagai Lembaga Adat	138
B. <i>Sarakopat</i> Sebagai Lembaga Pemerintahan.....	141
C. Jabatan Dan Fungsi <i>Sarakopat</i>	144
1. Fungsi <i>Reje</i> (Raja)	144
2. Fungsi <i>Imem</i> (Imam)	147
3. Fungsi <i>Petue</i> (Petua)	149
4. Fungsi <i>Rayat</i> (Rakyat)	152
D. Hubungan <i>Reje</i> , <i>Imem</i> , <i>Petue</i> , dan <i>Rayat</i> Dalam Sistem Hukum Adat Dan Pemerintahan	156
E. Sistem Pemilihan Dan Bagan Struktur Organisasi <i>Sarakopat</i>	159
F. Syarat-Syarat Menjadi <i>Sarakopat</i>	164
G. Tugas Dan Tujuan Pemerintahan <i>Sarakopat</i>	167
H. Sumber Kekuasaan <i>Sarakopat</i>	168
I. Bentuk Pemerintahan <i>Sarakopat</i>	171
J. Eksistensi <i>Falsafah Umah Pitu Ruang</i> (Rumah Tujuh Ruang)	175

BAB V SISTEM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN SARAKOPAT DI TANAH GAYO DAN RELEVANSINYA DENGAN SYARIAT ISLAM

A. Sistem Berdasarkan Hukum Adat.....	180
B. Sistem Kekerabatan	187
C. Sistem Sosial Kemasyarakatan	212

D. Sistem Keagamaan	218
E. Sistem Pendidikan	224
F. Sistem Ekonomi.....	230
BAB VII G. Sistem Musyawarah atau Demokrasi	239
H. Sistem Moral, Etika, Susila, dan Akhlak.....	243
I. Sistem Hukum Pidana Adat Gayo.....	250
BAB VI RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT	
TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	
DI KABUPATEN ACEH TENGAH	
A. Dalam Mengatur Dan Mengurus Pemerintahan Daerah.....	256
B. Dalam Menggali Sumber-Sumber Ekonomi Atau Keuangan Daerah	263
C. Dalam Menggali Dan Memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA)	268
D. Dalam Menggali Sumber Daya Manusia (SDM)..	272
E. Dalam Menumbuhkembangkan Prinsip Musyawarah dan Demokrasi.....	278
F. Dalam Meningkatkan Peranserta Masyarakat	283
G. Dalam Menggali Dan Mengimplementasikan Sosial Budaya/Adat Istiadat Dan Kemasyarakatan...	290
H. Dalam Memfungsikan Secara Optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Tengah	296
I. Dalam Upaya Mengaplikasikan Syariat Islam Dalam Kehidupan Masyarakat	304

J. Pembentukan Pola Pikir Yang Perlu Dikembangkan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	315
---	-----

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan	329
B. Saran-Saran	331

DAFTAR PUSTAKA	333
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR ANGKET

B. DAFTAR WAWANCARA

C. NAMA-NAMA INFORMAN / RESPONDEN PENELITIAN

D. REKOMENDASI TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah
2. Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kabupaten Aceh Tengah
3. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah
4. Ketua LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) Kabupaten Aceh Tengah
5. Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Aceh Tengah
6. Komandan Distrik Militer 0106 Kabupaten Aceh Tengah
7. Kepala Kepolisian Sektor Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI